

MODEL AKSI SOSIAL PADA MASYARAKAT PETAMBAK DI WILAYAH PESISIR KECAMATAN MUARA GEMBONG, KABUPATEN BEKASI

Anna Fatchiya¹

ABSTRACT

Social action model with program of cultivation of crab is one of the problem solving alternatives of conflict among branchish waterpond society with government (Ministry of Forestry of Republic of Indonesia- "Perhutani"). There are different interest among them that the coastal (mangrove forest) in order to a conservation and another side to living of the branchish waterpond community. The objectives of the research were (1) to describe of the social action components in the study location, and (2) to design a social action model with program of cultivation of crab. The research showed that (1) social action components indicated as (1) the actor components were branchish waterpond and "Perhutani", (b) situational and problem component was a conflict of different interest among coastal pond community with "Perhutani", (c) the objective component: mangrove was in order to living for the branchish waterpond, but for "Perhutani" it was in order to conservation thing, (d) the value and norm component: (e) there are legal formal and tradition (informal) about coastal management were adopted by them, and the way of the objective component: by branchish waterpond the mangrove in order to cultivate of fish, settlement, and firewood, and by Perhutani was monitoring and controlling of this (2) the principles of social action were participation, empowering, autonomy, and sustainability. To design of social action model systematically with step by step way. Firstly, planning (data collecting, data analyzing, problem identification, priority problem ellection, decide objective of program), input identification, decide of output, decide of outcomes, and evaluation

Keywords: social action model, conflict, coastal pond community, social action components

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut laporan PBB tahun 2007 yang disusun oleh para pakar yang tergabung dalam *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) tentang pemanasan global menyatakan bahwa dampak negatif pemanasan global bersifat nyata bagi kehidupan ratusan juta warga di dunia ini. Salah satu dampak pemanasan global adalah meningkatnya suhu permukaan bumi sepanjang lima tahun mendatang. Hal itu akan mengakibatkan gunung es di Amerika Latin mencair. Dampak lanjutannya adalah kegagalan panen, yang hingga tahun 2050 akan mengakibatkan 130 juta penduduk dunia terutama di Asia kelaparan. Pertanian gandum di Afrika juga mengalami nasib yang sama. Dampak lain, berupa meningkatnya permukaan laut, lenyapnya beberapa spesies dan bencana nasional yang makin meningkat. Disebutkan pula bahwa 30 persen garis pantai di dunia akan lenyap pada tahun 2080. Naiknya suhu udara memicu topan yang lebih dahsyat hingga mempengaruhi wilayah pantai yang selama ini aman dari gangguan badai. Banyak tempat yang kini kering akan makin kering, sebaliknya berbagai tempat basah akan makin basah.

Sejumlah pulau kecil di Indonesia diprediksikan hilang pada 30 tahun mendatang akibat pemanasan global. Kondisi alam, terutama laut, cukup mengkhawatirkan dengan naiknya suhu pemanasan global setiap tahun. Apalagi selama ini pulau-pulau kecil di Indonesia kurang terpelihara. Seperti halnya yang dinyatakan oleh salah seorang pakar lingkungan dari India, Rajendra Pachauri, bahwa pemanasan global setiap tahun menaikkan permukaan laut yang berdampak tenggelamnya pulau-pulau kecil di dunia, termasuk di Indonesia (Kompas, 12/02/2007).

¹ Staf Pengajar Departemen KPM, Fakultas Ekologi Manusia IPB

Muara Gembong yang berada di pantai utara Jawa Barat, merupakan salah satu daerah pesisir yang mengalami kerusakan lingkungan terkait dengan pemanasan global, terutama abrasi laut. Kondisi ini diperparah oleh hutan bakau/mangrove sebagai sabuk pengaman pantai semakin berkurang bahkan hanya tinggal 3% dari kondisi awalnya. Faktor utama penyusutan hutan bakau adalah pengalihfungsian menjadi kawasan non hutan, baik untuk pemukiman, industri, pertambangan dan lain-lain.

Dari sudut ekologis, hutan mangrove merupakan suatu bentuk ekosistem yang unik. Alasannya, di kawasan mangrove terpadu empat unsur biologis penting: daratan, pepohonan, fauna serta ekosistem. Sehingga, pengelolaan potensi hutan seperti ini harus tepat dan rasional agar fungsi ekologis dan ekonomisnya dapat dimanfaatkan secara maksimal. Fungsi hutan mangrove sendiri sebagai pelindung terhadap pengikisan pantai, pelindung terhadap angin laut, menahan intrusi air laut dan tempat berkembangnya biota laut, selain sebagai obyek penelitian dan obyek wisata yang perlu dikembangkan.

Secara yuridis formal penataan kawasan Muara Gembong sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang dasar pembuatannya disesuaikan dengan dinamika perkembangan masyarakat dan pembangunan yang terjadi. Dari seluruh wilayah Muara Gembong sebagian kecil diperuntukkan sebagai kawasan lindung hutan bakau. Pada kenyataannya lahan bakau yang tersisa sedikit justru semakin berkurang, yang sebab utamanya adalah adanya perluasan kawasan tambak masyarakat yang mengakuisisi lahan hutan lindung bakau.

Menurut sejarahnya, sebenarnya tambak sudah diusahakan oleh masyarakat setempat. Namun seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Muara Gembong dan permintaan pasar akan hasil-hasil tambak, menyebabkan kebutuhan akan lahan tambak meningkat. Lahan tambak hanya dapat diperluas oleh masyarakat dengan menebang pohon-pohon bakau di sepanjang pantai Muara Gembong. Di lain pihak, pemerintah dalam hal ini Perum Perhutani dibawah Departemen Kehutanan memiliki peran untuk mempertahankan lahan bakau yang ada guna menjaga kerusakan lingkungan pesisir. Perbedaan pemanfaatan atau fungsi atas hutan bakau antara kedua belah pihak sejak tahun 1950-an terus terjadi hingga saat ini. Beberapa konflik yang pernah terjadi bersifat terbuka, namun pada saat ini konflik terbuka sudah teredam, namun demikian sebenarnya konflik yang bersifat laten masih tetap ada, selama masing-masing pihak bersikukuh dengan keinginannya.

Keinginan Perum Perhutani untuk mengembalikan kawasan hutan bakau seperti semula sesuai dengan peraturan yuridis formal yang ada akan sulit diwujudkan, karena pada kenyataannya kawasan hutan bakau sudah menjadi lahan tambak masyarakat yang cukup luas, dan jika dipaksakan untuk difungsikan kembali menjadi hutan bakau, maka akan menimbulkan dampak sosial ekonomi yang cukup besar. Sebaliknya, akuisisi lanjut atas lahan hutan bakau dari masyarakat untuk perluasan tambak juga tidak bisa dibiarkan, karena dapat menimbulkan dampak pada kerusakan lingkungan pesisir akibat tidak adanya pelindung pantai dari hempasan ombak, angin laut, dan kerusakan biota laut, serta dampak lain akibat lain dari pemanasan global.

Dengan melihat kondisi faktual tersebut, maka perlu dicari upaya-upaya tertentu agar tujuan kedua belah pihak bisa tercapai semaksimal mungkin, dimana masyarakat yang hidup di kawasan hutan bakau tetap dapat mempertahankan hidupnya bahkan menjadi lebih baik, namun keberadaan hutan bakau bisa tetap dipertahankan bahkan bisa lebih diperluas dari yang selama ini ada. Berbagai alternatif dari upaya-upaya ini perlu dicari, yang nantinya dipilih salah satu diantara dengan indikator-indikator tertentu, misalnya ramah lingkungan, dapat mengembalikan kondisi lingkungan menjadi baik kembali, dan memberikan manfaat sosial ekonomi kepada masyarakat petambak.

Salah satu alternatif program yang memenuhi kriteria tersebut program usaha budidaya kepiting telur. Dilihat dari aspek pemasaran usaha ini cukup menjanjikan, karena permintaan (*demand*) kepiting telur saat ini cukup besar sedangkan penawaran

(supply) sangat terbatas, sehingga harga kepiting telur cukup tinggi. Dilihat dari aspek ekologis usaha ini juga menguntungkan, karena di lokasi tambak budidaya kepiting telur disyaratkan pohon bakau untuk tempat tumbuh kembang kepiting.

Pengenalan usaha budidaya kepiting telur dapat dikatakan sebagai bentuk aksi sosial kepada masyarakat petambak. Aksi sosial ini bertujuan utama untuk memecahkan masalah yang terjadi terkait dengan pemanfaatan lahan kawasan hutan bakau antara upaya untuk mempertahankan hutan bakau sebagai sabuk pengaman pantai dan sekaligus untuk menciptakan sumber hayat hidup masyarakat, khususnya para petambak.

Aksi sosial pengenalan masyarakat petambak tentang budidaya kepiting telur merupakan suatu proses yang perlu direncanakan dengan matang, agar tujuannya bisa dicapai secara efektif dan efisien. Untuk itu, sebelumnya perlu dibuat suatu model aksi sosial pengenalan kepiting telur pada masyarakat petambak.

1.2. Tujuan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penulisan ini adalah:

- (1) Mendeskripsikan komponen-komponen aksi sosial di lokasi penelitian di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.
- (2) Merumuskan model aksi sosial pada masyarakat petambak di wilayah pesisir kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi dengan program pengenalan budidaya kepiting telur pada areal tambak masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Konflik

Teori konflik merupakan antitesis terhadap teori fungsional yang menganggap suatu sistem sosial selalu berada dalam keadaan keseimbangan (equilibrium) Menurut Lockwood, dalam masyarakat ada mekanisme yang membuat konflik tidak dapat dihindari dan dilupakan. Misalnya perbedaan kekuasaan, kelangkaan sumberdaya, perbedaan minat bisa sumber ketegangan dan konflik dalam sistem sosial itu. Kekuatan-kekuatan ini, kata Lockwood, merupakan mekanisme disorder yang sama pentingnya dengan mekanisme sosialisasi dan sosial kontrol untuk memahami sistem sosial. Ralf Dahrendorf menganggap teori fungsional sama dengan suatu utopia, yang selalu mempertahankan konsensus universal pada tata nilai dan susunan sosial dan perspektif ini mengabaikan sejarah, disensus pada tata nilai dan konflik pada susunan institusional.

Potensi konflik selalu timbul dalam hubungan sosial. Ketika manusia diorganisasikan dalam kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan bersama, maka peluang konflik meningkat. Menurut Parker (1974), individu-individu itu berbeda dan membawa perbedaan itu kedalam kelompok-kelompok yang mereka bentuk. Perbedaan itu meliputi perbedaan kebutuhan, minat, sikap, latar belakang, ras dan perilaku. Hal ini sesungguhnya potensi untuk kemajuan, tetapi dapat juga memicu permusuhan, oposisi, agresi atau bentuk-bentuk konflik lainnya.

Fisher (2001) menyatakan bahwa konflik selalu ada dalam kehidupan masyarakat, dengan tipe-tipe konflik:

1. Tanpa konflik, yang berarti konflik sedang tidak terjadi
2. Konflik laten, sifatnya tersembunyi dan ini perlu diangkat ke permukaan sehingga dapat ditangani secara efektif
3. Konflik terbuka, adalah yang berakar dalam dan sangat nyata, perlu diambil berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan efeknya.
4. Konflik di permukaan, memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.

Pada dasarnya, konflik melibatkan satu atau lebih unsur-unsur berikut. Pertama, ancaman, sosial, psikologis atau fisik. Ancaman psikologis timbul ketika seseorang mengancam untuk merusak reputasi seseorang. Ancaman sosial timbul ketika suatu kelompok akan dihancurkan oleh tuntutan hukum berat oleh kelompok lain. Kedua, ketidaksepadanan minat. Ketidaksesuaian minat sering tampil dalam pendapat tentang tata-ruang suatu wilayah. Ketiga, ketidaksesuaian tujuan antar individu ataupun kelompok.

Meskipun efek sering dikonotasikan negatif, tetapi sebenarnya tidak seluruh konflik itu jelek dan tidak seluruh kerjasama itu baik (Robinson, 1972). Efek positif konflik bagi kelompok-kelompok sosial:

- a) Mendefinisikan dan mempertajam isu. Ketika pemihakan pada isu-isu tertentu terbentuk, argumentasi dan posisi diperjelas, maka hal ini akan mempermudah warga masyarakat membedakan dua pandangan yang berbeda;
- b) Membantu kelompok-kelompok yang bertikai untuk mendapat pengakuan. Namun bila tidak dikelola dgn baik, konflik dapat meningkatkan permusuhan, alienasi, dan perpecahan dalam dan antar kelompok dan dapat berdampak lama pada peluang kerjasama diantara kelompok-kelompok yang bertikai pada masa depan. Dalam hubungan ini, konflik merusak saluran komunikasi yang telah terbentuk;
- c) Konflik antar kelompok akan meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kelompok-kelompok yang bertikai, karena anggota-anggotanya memiliki tujuan yang sama;
- d) Konflik dalam kelompok memungkinkan anggota-anggotanya menyuarakan tuntutan mereka, dan memungkinkan restrukturisasi untuk meredakan ketegangan tersebut;
- e) Konflik dapat menumbuhkan aliansi antara suatu kelompok dengan kelompok-kelompok lain untuk melawan ancaman bersama;
- f) Konflik dapat menimbulkan perubahan sosial. Meskipun perubahan seringkali terjadi tanpa konflik, konflik tidak selalu menimbulkan perubahan; dan
- g) Konflik akan berubah menjadi tindak kekerasan, bahkan dapat menimbulkan kehancuran dan pertumpahan darah, jika prosesnya menimbulkan permusuhan yang dalam, dan membangkitkan perilaku destruktif. Namun, konflik tidak perlu mencakup atau berubah menjadi tindak kekerasan.

Konflik dalam suatu masyarakat selalu ada baik yang bersifat tertutup maupun terbuka, dan konflik tersebut tidak bisa dihindari keberadaannya. Namun demikian, konflik bisa dicegah untuk tidak menjadi tindakan kekerasan ataupun dapat direduksi seminimal mungkin. Caranya adalah dengan mengelola konflik-konflik tersebut. Adapun cara mengelola konflik adalah sebagai berikut: (1) mengakui adanya konflik; (2) menganalisis situasi yang ada untuk mengetahui konflik itu tentang apa: apakah menyangkut tata-nilai, tujuan, cara mencapai tujuan, teritorial atau kombinasi hal-hal tersebut; Selanjutnya, menganalisa perilaku pihak-pihak atau anggota-anggota kelompok-kelompok yang terlibat. Setelah itu, mengetahui adanya pihak-pihak yang dengan sengaja menggunakan konflik sebagai strategi, dan pada akhirnya mempelajari bagaimana konflik yang serupa diatasi; (3) Memperlancar komunikasi, dengan membuka jalur dan memperlancar komunikasi agar seluruh anggota dapat berpartisipasi dan berdiskusi dengan bebas. (4) Melakukan negosiasi. Negosiasi ialah proses pertukaran ide, dengan niat untuk mengubah hubungan, dan untuk mencapai kesepakatan diantara pihak-pihak yang bertikai. Tujuannya ialah untuk memuaskan kebutuhan pihak-pihak yang bertikai. Perlu mencari minat bersama dari pihak-pihak yang bertikai itu, dan mengusahakan agar keduanya merasa menang; (5) Membuat penyesuaian yang diperlukan, melaksanakan dan mengukuhkan; dan (6) Mengusahakan hidup dengan konflik itu, jika pihak-pihak yang bertikai tidak ingin menyelesaikannya.

Salah satu pendekatan dalam mengelola konflik adalah *community based conflict management* (CBCM) atau pengelolaan konflik berbasis masyarakat (PKBM). Secara umum visi awal PKBM adalah memperagakan kemungkinan-kemungkinan merubah

paradigma dan metode-metode penyelesaian konflik melalui konfrontasi dan permusuhan yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat, ke arah penyelesaian dan pemecahan konflik yang lebih kontekstual dengan mengelola akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya atau ter-ekskalasinya konflik.

Pada hakekatnya pemaknaan terhadap penyelesaian konflik sepenuhnya tergantung dari pihak-pihak yang berkepentingan, baik mengenai pilihan-pilihan yang diambil maupun dari hasil yang diharapkan dari proses penyelesaian itu. Sedangkan istilah yang berbasis masyarakat berarti bahwa proses diletakkan pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Proses mengelola konflik juga melibatkan unsur-unsur pencegahan konflik itu sendiri (*conflict anticipation*), analisis konflik, penyiapan kondisi untuk penyelesaian konflik, sampai kepada pelaksanaan berbagai pilihan penyelesaiannya, termasuk misalnya melalui negosiasi (Suporahardjo, 2000).

Prinsip-prinsip dalam PKBM adalah menyeluruh (*inklusif*), tanpa pembatasan (*unlimited*), dan secara nyata dibicarakan dan diterapkan (*applicable*). Proses akhir PKBM adalah terlaksananya pertemuan antara pihak-pihak yang berkonflik, dan menggunakan forum tersebut sebagai aktivitas yang nyata-nyata membicarakan suatu hal yang pasti, tidak didasarkan pada isu atau desas-desus.

Proses penyelesaian konflik dengan mendayagunakan pertemuan-pertemuan diupayakan untuk mencapai rekonsiliasi atau perdamaian, pemecahan perselisihan, dan penyelesaian bersama. Pada kesempatan tersebut dapat dilakukan pula proses-proses lain seperti mediasi, fasilitas, dan negosiasi.

2.2. Aksi Sosial

Banyak teori tentang aksi sosial yang berbeda dalam hal pendekatannya. Beberapa teori dimulai dari individu dan hubungannya dalam kelompok, teori yang lain berdasarkan kelompok ataupun menekankan pada proses dan dinamika yang terjadi pada kelompok. Ada pula teori yang menekankan pada kesukarelaan (*voluntarily stimulated action*) dan siapa yang berperan dalam penentu kebijakan atau yang berkuasa.

Menurut Wileden (1970) banyak individu yang memiliki ide untuk memperbaiki kondisi masyarakatnya, tetapi mereka banyak yang tidak tahu bagaimana mengimplementasikannya. Usaha untuk memperbaiki keadaan harusnya dimulai dari seorang atau beberapa orang dalam masyarakat tersebut yang memiliki kemampuan untuk menjalankan pekerjaan perbaikan, selanjutnya hasil kerja dari sekelompok orang ini dapat terus dikembangkan sehingga terus menerus akan menginfeksi yang lain dan pada akhirnya akan merubah keadaan seluruh masyarakat.

Herbert Thelen dalam Wileden (1970) mengemukakan ada sembilan langkah dalam mengimplementasikan ide seseorang untuk menjadi program komunitas, yaitu:

- (1) Adanya ide dari seseorang
- (2) Adanya pengarahan/ kepemimpinan dalam klik
- (3) Melakukan kontak ke masyarakat
- (4) Membuat perencanaan program
- (5) Melakukan tahap awal aksi
- (6) Mengadakan opini publik
- (7) Melakukan kerjasama dengan kelompok lain
- (8) Menyebarkan program ke seluruh jaringan masyarakat
- (9) Mengasimilasikan program dalam kehidupan masyarakat

Teori yang menekankan pada pentingnya individu yang memulai suatu pekerjaan perbaikan di atas dikenal sebagai teori aksi nuklir.

Teori aksi sosial dengan pendekatan kelompok antara lain dipelopori oleh Kurt Lewin dengan teori *quasi-stationary equilibrium theory of change* yang menyatakan bahwa lebih mudah merubah individu dalam kelompok daripada merubahnya secara individu satu persatu. Teori-teori motivasi kelompok yang dikembangkan oleh para

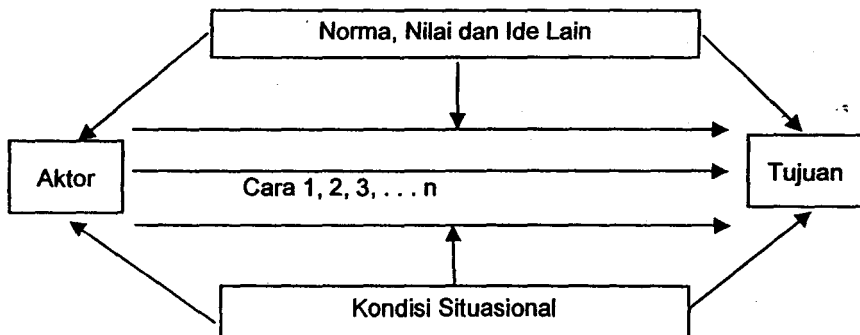
gestaltis dan strukturalis juga menunjukkan adanya pendekatan kelompok dalam perubahan sosial.

Teori aksi sosial yang menekankan pada kesukarelaan (*voluntarily stimulated action*) dikembangkan oleh Parson. Menurut Parson kesukarelaan ialah basis bagi pembuatan keputusan yang subyektif pada setiap individu aktor, tetapi keputusan-keputusan itu dipengaruhi oleh hambatan-hambatan normatif dan situasional.

Elemen-elemen teori aksi sosial ini dibangun dari: (1) Aktor yang berupa individu; (2) Aktor itu berusaha mencapai tujuan; (3) Aktor tersebut memiliki berbagai macam cara untuk mencapai tujuan itu; (4) Aktor itu dibatasi oleh berbagai kondisi situasional, seperti kemampuan biologis dan unsur-unsur genetisnya, serta hambatan ekologis yang bersifat eksternal yang mempengaruhi pemilihan tujuan dan cara untuk mencapainya; (5) Aktor itu dipengaruhi oleh tata-nilai, norma, dan ide-ide lain yang mempengaruhinya dalam menetapkan apa tujuan yang hendak dicapai dan bagaimana cara mencapainya; dan (6) Karena itu, aksi melibatkan pembuatan keputusan subyektif oleh aktor tentang cara mencapai tujuan. Hal ini dibatasi oleh hambatan-hambatan yang berasal dari ide-ide itu dan kondisi situasionalnya.

Transisi dari unit aksi yang diskrit ke sistem aksi, terjadi secara bertahap sejalan dengan perkembangan konsep-konsep berikut ini:

1. Aksi tidak terjadi dalam suatu situasi sosial yang vakum.
2. Aksi terjadi dalam suatu konteks sosial. Aktor memiliki suatu status dan memainkan suatu peranan, yang ditentukan secara normatif.
3. Dalam berbagai sistem, status-peranan tidaklah terpisah, tetapi berhubungan satu sama lain.
4. Karena itu, unit aksi harus dilihat dari perspektif sistem interaksi. Aksi, dalam hal ini, dapat dilihat sebagai pola pelaksanaan suatu peranan oleh seorang aktor.
5. Suatu sistem sosial ialah sistem interaksi yang melibatkan banyak aktor, yang menduduki berbagai status-posisi dan menjalankan berbagai macam peranan yang telah ditentukan secara normatif.
6. Sistem interaksi itu diwarnai oleh personalitas para aktornya. Dalam hal ini, personalitas ialah saling hubungannya kebutuhan dan kapasitas pembuatan keputusan oleh aktor-aktor, yang memainkan peranan dalam sistem sosial itu.



Gambar 5. Unit Aksi Sukarela

2.3. Pengembangan Model

Menurut Hill & Kerber (1967), model ialah representasi sebuah subyek, yang sedang diselidiki. Misalnya suatu objek, proses, atau sistem, yang akan digunakan untuk mengendalikan, meramalkan dan membuat keputusan.

Powell (2005) menyatakan model sebagai

"(1) small object, representing another, often larger object (represents reality, isn't reality), (2) preliminary pattern serving as a plan, (3) tentative description of a system or theory that accounts for all of its known properties"

Pemodelan telah umum digunakan, baik dalam pendidikan, penelitian maupun aksi sosial untuk mengembangkan suatu masyarakat. Kingston (1965) menyatakan bahwa pengembangan model berguna untuk:

1. Mengungkapkan suatu fenomena yang sedang diselidiki secara detail;
2. Membantu peneliti untuk memahami dengan baik hubungan berbagai komponen fenomena tersebut, dan
3. Membantu peneliti mengontrol faktor-faktor tertentu untuk mengetahui cara bagian-bagian fenomena tersebut berfungsi.

Dinyatakan oleh Powell (2005) pembuatan model suatu program bermanfaat untuk:

1. Menggambarkan program dan intervensi
2. Representasi grafis aksi sosial yang dilakukan, menyangkut apa yang diinvestasikan, dikerjakan, dan hasilnya
3. Dasar bagi perencanaan dan evaluasi

Hill & Kerber menyatakan bahwa ada tiga macam model, yaitu: (1) Model ikonik, yaitu representasi piktorial (gambar) bagian-bagian tertentu atau keseluruhan suatu sistem yang sedang diselidiki. Contoh sebuah model ikonik ialah gambar atau foto pesawat tempur, mobil, bintang, dan lain sebagainya. (2) Model analog, berbentuk diagram, bagan alir, atau representasi sebuah sistem yang sedang dipelajari, dengan menggambarkan seperangkat bagian-bagian sistem tersebut yang isomorfik, dan (3) Model Simbolik, yaitu sebuah representasi formula yang didapat dari pemakaian simbol-simbol untuk menunjukan bagian-bagian suatu sistem yang sedang diselidiki. Contoh model simbolik yang baik ialah suatu persamaan matematika yang mengungkapkan situasi suatu masalah yang sedang dipelajari, contohnya: $Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_nx_n$.

Dalam ilmu sosial, model analog lebih banyak digunakan untuk menggambarkan kerangka berfikir dari suatu teori secara lebih sederhana dan mudah dipahami.

III. METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Faisal, 2003). Adapun masalah yang dieksplorasi dalam penelitian ini adalah fenomena konflik pemanfaatan kawasan pesisir di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, terutama antara masyarakat petambak dengan pihak Perhutani. Selain itu, juga akan digambarkan alternatif model aksi sosial yang dapat dijadikan salah satu pemecahan masalah (problem solving) guna terhadap konflik yang terjadi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Komponen-Komponen Aksi Sosial

Mengacu pada teori aksi sosial yang menekankan pada kesukarelaan (*voluntarily stimulated action*) oleh Parson, bahwa kesukarelaan ialah basis bagi pembuatan keputusan yang subyektif pada setiap individu aktor, tetapi keputusan-keputusan itu dipengaruhi oleh hambatan-hambatan normatif dan situasional, maka berikut diuraikan elemen-elemen aksi sosial yang terdiri dari aktor, kondisi situasional, tujuan, tata nilai dan

norma, dan cara mencapai tujuan dari komunitas desa pesisir di Muara Gembong yang umumnya didominasi oleh masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petambak.

a. Aktor

Aktor dapat diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang dengan caranya masing-masing berusaha untuk memenuhi tujuannya, yang terkadang dalam mencapai tujuan tersebut terhalang oleh situasi atau masalah dan norma atau aturan yang ada dalam sistem sosial.

Terkait dengan pemanfaatan kawasan pesisir di Muara Gembong, banyak pihak yang masing-masing memiliki kepentingan di dalamnya. Dapat dikatakan pihak-pihak ini sebagai pemangku kepentingan (*Stakeholders*). Identifikasi *stakeholders* dalam melihat suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan suatu ekosistem sangat penting untuk dilakukan. Dengan adanya pengetahuan tentang siapa saja yang terlibat dalam suatu permasalahan, maka akan didapatkan suatu pemahaman tentang situasi yang lebih baik, dapat memperoleh penjelasan dimana letak kekuasaan berada, bentuk-bentuk intervensi pihak-pihak tertentu, dan melihat keseimbangan kegiatan yang dilakukan setiap pihak.

Melalui analisis *stakeholders* juga dapat diketahui pihak-pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi terjadinya masalah, dan bagaimana hubungan yang terjadi antar pihak yang berkepentingan. Dengan demikian diharapkan out put dari proses pengidentifikasian dan analisis *stakeholders* dapat digunakan sebagai masukan dalam mengelola permasalahan ataupun konflik tersebut.

Akar permasalahan utama pada konflik yang terjadi di Muara Gembong pada intinya adalah adanya perbedaan kepentingan oleh berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir di lokasi yang sama. Adapun tingkatannya mulai dari pusat hingga tingkat lokal. Berdasarkan hasil kajian Yulianti (2006) *stakeholders* yang terlibat dalam konflik kepentingan kawasan pesisir Muara Gembong seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Identifikasi Stakeholders yang Memanfaatkan Kawasan Pesisir Muara Gembong

No	Level	Stakeholders	Kepentingan
1	Nasional	Dep. Kehutanan dan Perkebunan	Pemegang hak pengawasan dan pengelolaan wilayah kehutanan Muara Gembong, dan mempertahankan fungsi kawasan sebagai hutan lindung
		Dep. Kelautan dan Perikanan	Mengatur pengelolaan wilayah pesisir Muara Gembong
		Departemen Perindustrian	Mengatur pengelolaan industri berat dan ringan di kawasan pesisir Muara Gembong
		Departemen Pariwisata	Mengatur pengelolaan daerah wisata kawasan pesisir Muara Gembong
2.	Regional	Pemda Kabupaten Bekasi	Melakukan perencanaan dan pengembangan kawasan untuk mendatangkan aset bagi pendapatan daerah
		1. Bappeda	Membuat perencanaan kawasan pesisir Muara Gembong
		2. BPN	Menerbitkan sertifikat pemilikan lahan
		3. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan	Mengembangkan sektor perikanan dan memberikan bimbingan terhadap petani tambak
		4. Dinas Kehutanan	Mengelola aset kehutanan di kawasan pesisir Muara Gembong
		5. Pemerintahan Kecamatan Muara Gembong	Pengawas dan pelaksana pembangunan tingkat kecamatan
		6. Pemerintah desa di kelima desa Kec. Muara Gembong	Pengawas dan pelaksana pembangunan tingkat desa
3.	Local offsite	Perum Perhutani	Melakukan pengawasan sesuai instruksi Departemen Kehutanan
4.	Local onsite	Petambak	Memanfaatkan kawasan hutan mangrove sebagai kawasan tambak untuk kepentingan ekonomi dan pemukiman
		Nelayan	Memanfaatkan kawasan pesisir sebagai <i>fishing ground</i> dan sebagai pemukiman

Sumber: Yulianti (2006)

b. Kondisi Situasional dan Permasalahan

Kecamatan Muara Gembong merupakan daerah pesisir yang terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Secara administratif kecamatan ini membawahi enam desa, yaitu Desa Pantai Mekar, Pantai Sederhana, Pantai Harapan Jaya, Pantai Jayasakti, dan Pantai Bahagia, dengan luas wilayah mencapai 13.205 ha.

Berdasarkan topografinya, Kecamatan Muara Gembong umumnya berupa daratan dengan elevasi 0-5 derajat dengan ketinggian $\pm 0,74$ meter dari permukaan laut. Sedangkan berdasar klasifikasi iklim Schmid dan Ferguson termasuk dalam tipe C dengan curah hujan rata-raa 1.753 mm. Suhu udara berkisar antara 23-32 derajat celsius dengan kelembaban 77-99%.

Kawasan pesisir Muara Gembong terdiri dari areal perkampungan, tambak, kebun campuran, tegalan, semak, dan hutan. Penggunaan lahannya didominasi oleh tambak air payau. Luas areal tambak cukup luas mencapai 67,79% dari keseluruhan kawasan Kecamatan Muara Gembong atau seluas 6.181,29 ha.

Tambak yang diusahakan oleh masyarakat merupakan konversi dari hutan mangrove/bakau yang dahulu merupakan ekosistem utama di pesisir Muara Gembong. Luasan hutan mangrove sampai saat ini hanya tersisa 3,62% dari luas sebelumnya pada tahun 1950-an. Upaya reboisasi yang dilakukan Perum Perhutani tidak mampu mengimbangi tingkat konversi lahan yang sangat tinggi.

Jumlah penduduk di Kecamatan Muara Gembong sebesar 38.853 jiwa yang terdiri dari 17.471 orang laki-laki dan 16.381 jiwa perempuan, dan jumlah rumah tangga sebanyak 8.228 KK (Kepala Keluarga). Tingkat kepadatan penduduknya tergolong sangat rendah hanya 2 jiwa/km².

Penduduk Muara Gembong terdiri dari beragam suku bangsa, seperti Betawi, Sunda, Jawa, dan Bugis. Berdasarkan asal-usulnya umumnya mereka berasal dari wilayah Bekasi dan sekitarnya, Cirebon, Indramayu, dan Makassar.

Pemukiman penduduk Muara Gembong terpusat di lokasi-lokasi tertentu, terutama di sekitar areal tambak dan tepian sungai ke arah hulu. Pemukiman ini terbentuk seiring dengan proses di awal pembuatan tambak. Lokasi rumah yang dekat dengan tambak memudahkan masyarakat dalam mengelola tambak.

Mata pencaharian utama masyarakat pada umumnya di sektor perikanan, terutama di pertambakan dan penangkapan (nelayan) (Tabel 2).

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Muara Gembong Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	Tani tambak	3.337
2	Buruh tani	1.647
3	Nelayan	2.588
4	Industri/kerajinan kecil	117
5	Industri sedang/besar	155
6	PNS/TNI	265
7	Pedagang	660
8	Angkutan	501
9	Lainnya	1.288
	Jumlah	10.588

Sumber: BPM Kabupaten Bekasi (2004)

Tingkat pendidikan masyarakat Muara Gembong pada umumnya tergolong rendah, dengan rata-rata lama sekolah penduduk sekitar 5,63 tahun (Buku Profil Desa, 2004) atau jika dikonversi dengan tingkatan formal pendidikan tidak sampai lulus Sekolah Dasar.

c. Permasalahan Pemanfaatan Kawasan Pesisir

Berdasarkan sejarahnya, pemilik tanah di Muara Gembong (dahulu Cabang Bungin) yang pertama adalah Gouw Medjh; selanjutnya tanah dihibahkan kepada Gouw Tjeng dan Gouw Tjeng Low. Pada tahun 1949 Pemerintah membeli tanah tersebut yang seluas 9.311 ha, sehingga statusnya berubah menjadi tanah negara bebas. Pembelian tanah ini bertujuan untuk melindungi bagian hilir atau muara Sungai Citarum dan Kali Bekasi dan rawa-rawa di sekitarnya, menjaga dari abrasi laut, dan menyediakan bahan bakar bagi penduduk Jakarta dan sekitarnya. Pada tahun 1951 pengawasan dan pemeliharaan di tanah ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah Bekasi, dan pada tahun 1954 oleh Menteri Pertanian areal tersebut dijadikan kawasan hutan. Sejak tahun 1978 mulai banyak permasalahan agraria yang muncul terutama adanya okupasi penduduk, yang berupa pemukiman dan sawah/kolam. Pada tahun yang sama pengelolaan kawasan diserahkan oleh Jawatan Kehutanan kepada Perum Perhutani.

Dalam perkembangannya, jumlah pemukiman dan tambak semakin bertambah. Di lain pihak Perum Perhutani belum dapat mengelola kawasan hutan tersebut secara optimal. Hal ini berlangsung terus menerus, sehingga sampai dengan saat ini tegakan bakaü yang tersisa tinggal kira-kira 6,51% dari luas kawasan hutan lindung Ujung Karawang (Soekotjo 2005).

Munculnya konflik pemanfaatan lahan di Muara Gembong berawal dari pertentangan antara Departemen Kehutanan dengan Direktorat Agraria, dimana tanah hutan negara di bawah pengawasan Departemen Kehutanan dijadikan tanah milik masyarakat dengan dibuatnya surat girik oleh Direktorat Agraria. Tanah-tanah ini sebelumnya antara tahun 1960-1971 disewakan kepada masyarakat oleh Pemda Bekasi.

Sejak tahun 1970-an petambak mulai dikenakan pungutan-pungutan, misalnya tahun 1977 Kesatuan Resor Pemangkuan Hutan (KRPH) sebagai unit pelaksana usaha Perum Perhutani memungut uang balas jasa kepada para penggarap empang/tambak alam kawasan hutan sebesar Rp 100.000,00 per tahun, pungutan ini digunakan untuk membayar pegawai KRPH yang tidak mendapat gaji. Setahun kemudian pungutan ini dicabut dan diberlakukan proyek Mantri Lurah (MALU). Oleh kepala desa program ini dimanfaatkan untuk memungut iuran bagi penggarap tambak sebesar Rp 1.500/ha/tahun tanpa sepengetahuan Perhutani.

Pada tahun 1981 Perhutani bersama Pemda Bekasi melakukan pengukuran (inventarisasi) kembali tanah kehutanan, dan menetapkan aturan kepada penggarap tanah kawasan hutan membuat surat pernyataan menggarap di kawasan hutan. Penggarap dikenai pungutan kembali pada tahun 1981 atas hasil kesepakatan Perhutani dan Pemda Bekasi dengan nilai Rp 15.000,00 per hektar untuk penggarap kelas I dan Rp 10.000,00 per ha untuk penggarap kelas II, hasil pungutan ini dibagikan masing-masing setengah bagian untuk Pemda Bekasi dan Perhutani. Pada tahun 1987 pungutan ini dicabut, namun oleh Pemerintah Desa pungutan ini sampai sekarang tetap diberlakukan tanpa sepengetahuan Perhutani.

Pemda Bekasi pada tahun 1994/1995 menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap tanah di kawasan hutan yang digarap oleh masyarakat, hingga saat ini PBB tersebut tetap berlaku.

Pungutan terhadap penggarap tambak terus berlangsung, pada tahun 1998 dalam rangka peningkatan pendapatan Kantor Pemangku Hutan (KPH) Bogor yang membawahi KRPH Muara Gembong (Perhutani) menetapkan iuran Ganti Rugi Garapan Pemangku Kawasan Hutan (GRPKH). Rupanya masyarakat menolak untuk membayar iuran ini, dengan alasan sudah ada pungutan PBB dari Pemerintah Daerah. Protes masyarakat oleh DPRD Kabupaten Bekasi ditindaklanjuti dan dibahas bersama Perhutani dan diperoleh kesimpulan berupa solusi tahap pertama menunda pungutan GRPKH dan PBB untuk meredam gejolak di masyarakat, dan solusi tahap kedua memproses secara lengkap dan menyeluruh dengan tidak mengesampingkan aspek lingkungan hidup. Rupanya Pemda Bekasi tidak puas dengan keputusan ini, sehingga Pemda Bekasi

berinisiatif untuk mengajukan permohonan izin penataan ulang peruntukan penggunaan dan penguasaan tanah di Pantai Utara Bekasi (BKPH Ujung Karawang) dan untuk diadakan peninjauan kembali status kawasan hutan menjadi tanah negara bebas.

Konstelasi konflik antara masyarakat dengan Perhutani mencapai puncaknya pada tahun 2000, dimana warga masyarakat gabungan dari semua desa sekecamatan Muara Gembong mendatangi Kantor Pemda Bekasi untuk meminta agar Pemda Bekasi mengusir Perhutani dari Muara Gembong. Demonstrasi ini dipicu oleh penutupan pintu air tambak oleh petugas Perhutani BKPH Ujung Karawang dengan alasan penggarap tambak tidak mematuhi aturan Perhutani. Aksi masyarakat yang kedua muncul, dimana tiga orang penggarap tambak ditahan di Polres Bekasi karena telah menebang tanaman bakau dalam kawasan hutan. Demonstrasi masyarakat muncul lagi tahun 2002, mereka menuntut agar tanah garapannya diproses menjadi hak milik.

4.2. Tata Nilai dan Norma Masyarakat

Tata nilai dan norma merupakan pedoman bagi anggota sistem sosial untuk bertindak sesuai dengan kesepakatan bersama, dan tujuannya untuk menjaga agar sistem sosial tetap bisa eksis. Tata nilai dan norma yang berupa aturan-aturan terkadang bisa menjadi faktor bagi aktor dalam sistem sosial untuk mencapai tujuannya.

Dalam kaitannya dengan permasalahan pemanfaatan kawasan ekosistem di Muara Gembong, sebenarnya sudah banyak peraturan legal formal yang mengatur pemanfaatan kawasan tersebut. Bahkan sejak lama peraturan ini ditetapkan. Beberapa diantaranya: Keputusan Menteri Pertanian nomor 92/UM/54 tanggal 31 Agustus 1954 tentang tata batas kawasan hutan di Muara Gembong, dan Surat Perjanjian antara Pemda Bekasi dengan pihak Kehutanan nomor 95/EK/SPK/EK/28.26.3/VI/1985 dan nomor 09.7/BGR/III Tanggal 6 Mei 1985 tentang kerjasama Pengamanan, Pelestarian dan Pemanfaatan Hutan Bakau di Pantai Utara Kabupaten Bekasi. Namun, pada kenyataannya penegakan peraturan-peraturan tersebut di lapang sangat lemah. Sanksi-sanksi yang seharusnya dikenakan bagi para pelanggar aturan tidak dijalankan. Departemen Kehutanan yang memiliki kewenangan untuk mengelola hutan di kawasan pesisir tidak memiliki cukup dana dan tenaga pengawas dalam menjalankan perannya, di lain pihak okupasi penduduk untuk merambah hutan bakau sebagai areal pemukiman dan tambak semakin meluas.

Selain peraturan legal formal di atas ada juga peraturan yang bersifat informal atau adat-kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat. Peraturan adat yang mengikat anggota masyarakat umumnya terkait dengan pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kalangan para penggarap tambak, juga terdapat aturan informal namun mengikat di antara mereka, misalnya aturan untuk meminta izin membuka tambak dari tokoh masyarakat dan pemilik tambak sebelah, pengaturan pembagian air dan lain sebagainya. Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar peraturan informal ini umumnya bersifat adat juga, misalnya dicerca ataupun dikucilkan dari pergaulan sesama.

4.3. Tujuan

Seperti sebelumnya telah dijelaskan, konflik yang terjadi antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam memanfaatkan kawasan pesisir Muara Gembong telah menimbulkan konflik. Konflik yang nampak jelas karena sudah berbentuk konflik terbuka terjadi antara Perum Perhutani dengan para petambak.

Ketidak sesuaian tujuan menurut Turner (1978) merupakan salah satu unsur yang dapat menyebabkan terjadinya konflik. Dalam hal ini tujuan Perum Perhutani dalam memanfaatkan kawasan pesisir Muara Gembong adalah melindungi hutan lindung di kawasan pesisir tersebut dari gangguan-gangguan yang mengancam keberadaan hutan bakau ini, mengingat manfaat hutan bakau sangat penting untuk keseimbangan ekosistem wilayah pesisir dan mencegah abrasi laut.

Sebaliknya, bagi masyarakat, khususnya para petambak, kawasan pesisir dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka membuka dan memperluas tambak bahkan sampai mengokupasi hutan lindung untuk memenuhi kebutuhan hidup ini, termasuk untuk kebutuhan papan (tempat tinggal).

4.4. Cara

Cara yang digunakan oleh anggota komunitas dalam mencapai tujuannya bisa berbeda-beda, sehingga seringkali perbedaan ini menimbulkan konflik di antara mereka. Terkait dengan situasi yang terjadi di Muara Gembong, terdapat perbedaan yang kontras antara Perum Perhutani dan masyarakat terutama penggarap tambak dalam memanfaatkan kawasan pesisir untuk kepentingannya masing-masing.

Para penggarap tambak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, memanfaatkan kawasan pesisir dengan cara:

- Membuka hutan mangrove untuk lahan tambak, dengan cara menebangi pohon-pohonnya.
- Memanfaatkan pohon bakau sebagai bahan bakar.
- Menjadikan kawasan pesisir terutama di bekas hutan bakau dan bantaran sungai sebagai tempat tinggal/pemukiman.

Sebaliknya Perum Perhutani dalam mengelola hutan bakau melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan keberadaan hutan bakau tersebut. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain:

- Melakukan pengawasan terhadap hutan bakau, agar masyarakat tidak menggunakannya untuk pembukaan tambak. Misalnya dengan mengadakan patroli rutin dan menempatkan petugas "jagawana" di desa setempat
- Melakukan kerjasama dengan instansi lain yang terkait, misalnya dengan Pemda Bekasi dan Departemen Kelautan dan Perikanan dengan tujuan mencari upaya bersama agar masyarakat tidak semakin mengokupasi hutan bakau.
- Berusaha menegakkan sanksi yang lebih tegas, dengan melaporkan warga masyarakat yang menebang pohon bakau di kawasan hutan lindung ke Kepolisian.

Cara pemanfaatan kawasan pesisir yang sangat bertolak belakang tersebut seringkali menimbulkan konflik di antara keduanya, baik dalam bentuk konflik terbuka maupun yang laten. Konflik yang terbuka yang pernah terjadi misalnya masyarakat mengusir petugas jagawana dan berdemo menuntut pengusiran keberadaan Perhutani. Adapun yang bersifat konflik laten sampai saat ini masih tetap ada, masih ada perasaan curiga dan was-was dari kedua belah pihak. Dengan mengacu istilah Turner (1978) sebagai adanya unsur ancaman psikologis.

4.5. Model Aksi Sosial

Model aksi sosial yang dapat dikembangkan di Muara Gembong dilatarbelakangi oleh adanya konflik kepentingan antara pihak Perum Perhutani dengan masyarakat di Muara Gembong, khususnya para petambak yang menjadi mata pencaharian utama di wilayah ini.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kepentingan masyarakat dalam memanfaatkan lahan pesisir adalah untuk sumber kehidupan dan pemukiman, sebaliknya Perhutani berkepentingan terhadap pengembalian fungsi hutan mangrove sebagai hutan lindung.

Dampak konflik yang terjadi antara kedua belah pihak ini lebih banyak bersifat negatif daripada dampak positifnya. Dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat terutama bagi petambak adalah adanya rasa ketidaktenangan dalam berusaha, demikian juga bagi Perhutani ada kecemasan jika petambak dibiarkan mengokupasi tambak maka kerusakan lingkungan pesisir akan terancam. Sebenarnya jika dicermati sebenarnya petambak berkepentingan terhadap keberadaan kawasan pesisir yang terjaga

kelestariannya, karena dengan adanya hutan mangrove maka abrasi laut dapat dihindari dan kehidupan biota mangrove yang menjamin penyediaan makanan ikan tetap terjaga.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan suatu jembatan yang mampu menghubungkan antara kedua sisi kepentingan, artinya masyarakat petambak tetap dapat hidup dan tinggal di wilayah yang disengketakan dan sebaliknya pihak Perhutani tidak perlu mengeluarkan banyak sumberdaya dana maupun tenaga untuk menjaga wilayah hutan lindung dari kegiatan perluasan tambak maupun pemukiman penduduk. Bahkan lebih dari itu bisa didiharapkan bahwa hutan bakau yang selama ini telah gundul dihijaukan kembali. Pendekatan yang demikian ini dapat dikatakan sebagai pendekatan yang berasas *win-win solution* (Pareto dan Ury 1981), yaitu menciptakan persetujuan dan hasil yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang berkepentingan dalam konflik tanpa harus melakukan tawar menawar yang alot. Makna *win-win solution* adalah adanya rasa kepuasan dari masing-masing pihak yang berkonflik terhadap kesepakatan yang diraih.

Model aksi sosial yang direncanakan pada masyarakat petambak di Muara Gembong bertujuan utama untuk memberdayakan masyarakat petambak. Pengertiannya adalah menjadikan petambak mandiri mampu menolong dirinya sendiri dalam mengatasi segala situasi maupun permasalahan yang dihadapinya, dengan cara meningkatkan kemampuan dirinya baik dalam hal pengetahuan, sikap maupun keterampilannya. Di samping itu, juga mampu mengakses sumberdaya yang ada untuk kehidupannya, seperti lahan tambak beserta input usaha yang lain, informasi, akses pasar dan sebagainya. Tujuan aksi sosial juga diarahkan tidak semata-mata untuk kepentingan hidup petambak pada saat ini, melainkan juga mengupayakan agar faktor keberlangsungan hidup (*sustainability*) masyarakat petambak tetap terjaga. Caranya adalah dengan mempertahankan bahkan meningkatkan kondisi ekosistem wilayah pantai atau pesisir agar tetap memiliki daya dukung yang kuat dan berkesinambungan dalam menyokong kehidupan masyarakat petambak itu sendiri.

Banyak alternatif program yang bisa ditawarkan dalam rangka memberdayakan masyarakat petambak. Namun tidak semua program tersebut mampu memenuhi kedua syarat di atas, yaitu meningkatkan kehidupan masyarakat petambak menjadi lebih baik, sekaligus dapat memperbaiki ekosistem pesisir. Salah satu program yang berpeluang untuk mampu memenuhi kedua persyaratan tersebut di atas adalah usaha budidaya kepiting telur di lahan tambak. Banyak nilai lebih yang diperoleh dari usaha ini antara lain sebagai berikut:

1. Modal yang dibutuhkan relatif bisa dijangkau oleh petambak, dengan rata-rata modal awal untuk investasi (karamba/dondang) dan modal kerja (pakan dan bibit) sebesar Rp 1 juta, dan untuk modal kerja selanjutnya lebih rendah dari itu.
2. Peluang pasarnya sangat tinggi, karena selama ini tingkat permintaannya jauh melebihi tingkat penawarannya, sehingga harga jual kepiting telur menjadi relatif tinggi berkisar Rp 40.000 per kg.
3. Keuntungan yang diperoleh dari usaha ini cukup tinggi, untuk setiap karamba dengan masa pemeliharaan yang hanya 40 hari rata-rata senilai Rp 4.552.000,00, sehingga bisa dibayangkan pendapatan tiap tahunnya akan cukup besar.
4. Teknik budidaya kepiting telur relatif sederhana, sehingga akan mudah dijalankan oleh petambak dan tidak jauh berbeda dengan usaha yang selama ini digeluti oleh petambak. Pemeliharaan kepiting cukup dengan memberikan pakan kepiting kecil-kecil (*yuyu/keuyep*).
5. Usaha budidaya kepiting telur tidak bertentangan dengan norma dan tata nilai masyarakat setempat.
6. Usaha ini dapat diujicobakan dalam skala yang kecil, sehingga tidak memberatkan masyarakat yang mau mencoba karena harus menyediakan biaya besar untuk ujicoba tersebut.

7. Hasil usaha budidaya kepiting telur dapat segera terlihat hasilnya, hanya dalam waktu 40 hari sudah bisa panen.
8. Usaha budidaya kepiting tembakau bersifat ramah lingkungan karena input yang diperlukan tidak bersifat merusak alam, seperti halnya penggunaan obat-obatan hama penyakit kimia.
9. Terkait dengan habitatnya kepiting memerlukan pohon bakau, oleh karenanya pada setiap petakan tambak/empang perlu ditanam pohon bakau. Dengan demikian secara tidak langsung terjadi reboisasi hutan bakau.
10. Selama ini bibit kepiting masih diperoleh dari hasil tangkapan, sehingga ketersediaannya di alam makin lama bisa makin berkurang, terlebih lagi hutan bakau sebagai habitatnya semakin terbatas pula. Kondisi ini bisa dijadikan bahan penyadaran bagi masyarakat yaitu jika ingin usahanya terus berlanjut, maka mereka harus mengusahakan agar habitat kepiting tetap dijaga. Dengan demikian menjadikan masyarakat sendiri yang akan mempertahankan dan meningkatkan kelestarian ekosistem pantai/pesisir. Terkait dengan hal tersebut juga dikembangkan pembenihan kepiting, sehingga *stock* di alam tetap terjaga sekaligus untuk menjaga kelangsungan usaha masyarakat itu sendiri.

Kegiatan aksi sosial didasarkan pada model aksi sosial yang akan diterapkan di Muara Gembong (Gambar 1). Uraianya adalah sebagai berikut:

1. Sebelum pelaksanaan aksi

Dalam pelaksanaan program aksi sosial pengenalan usaha budidaya kepiting telur sebelumnya telah melalui beberapa tahapan, yaitu:

(1) Pengumpulan data keadaan

Pengumpulan data keadaan merupakan pengumpulan data dasar (*data-base*) yang diperlukan untuk menentukan masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan. Data keadaan wilayah Muara Gembong telah diuraikan pada Bab II, secara ringkasnya tergambar bahwa Muara Gembong merupakan kawasan pesisir dengan sebagian besar penggunaan lahannya digunakan untuk usaha tambak. Dengan demikian mata pencaharian sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertambakan, dan umumnya berpendidikan rendah.

(2) Analisis data keadaan

Hasil pengumpulan data selanjutnya dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil analisis selanjutnya dideskripsikan untuk memberikan gambaran tentang keadaan dan diberikan penilaian yang nantinya dijadikan bahan untuk mengidentifikasi masalah.

(3) Identifikasi masalah

Identifikasi masalah merupakan upaya untuk merumuskan hal-hal yang tidak dikehendaki atau faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang dikehendaki. Hasil analisis data keadaan menunjukkan adanya beberapa masalah yang terjadi di Muara Gembong, yaitu sebagai berikut:

- a) Tingkat pendidikan masyarakat rendah, umumnya tidak tamat SD
- b) Tingkat pendapatan yang relatif rendah, dengan nilai rata-rata masih di bawah 2 dollar AS per hari per kapita.
- c) Penduduk Muara Gembong, khususnya komunitas petambak hidup di pemukiman yang relatif kumuh dengan ketersediaan air bersih yang terbatas.
- d) Adanya penciptaan luas hutan lindung mangrove oleh aktivitas ekonomi masyarakat setempat, terutama untuk lahan tambak.
- e) Munculnya konflik terbuka maupun laten antara masyarakat dengan Perum Perhutani terkait dengan pemanfaat kawasan pesisir Muara Gembong yang berbeda, di pihak petambak untuk pemenuhan kebutuhan hidup yaitu untuk lahan tambak dan pemukiman, dan sebaliknya bagi Perhutani untuk kawasan hutan lindung bakau.

(4) Pemilihan prioritas masalah

Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam menentukan skala prioritas dalam perumusan program adalah pemilihan masalah yang memang benar-benar menjadi kebutuhan nyata (*real need*) masyarakat dan bersifat strategis yang berarti dapat dilaksanakan dengan biaya murah, membutuhkan waktu singkat, tetapi mampu memberikan manfaat yang besar dalam merubah perilaku, peningkatan produktivitas, dan peningkatan kehidupan/kesejahteraan masyarakat.

Masalah utama yang perlu didahulukan sehubungan dengan banyaknya masalah di Muara Gembong adalah masalah tentang adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat petambak dengan Perhutani. Masalah ini menjadi *leader problem* bagi masalah yang lain, artinya jika masalah ini dapat dipecahkan maka akan menarik penyelesaian masalah yang lain. Sebagai gambarnya, jika perbedaan kedua kepentingan dapat terjembatani dengan baik, maka idealnya kepentingan masyarakat untuk hidup sejahtera dari hasil tambaknya bisa tercapai dan ekosistem pesisir terjaga. Rentetannya, kemiskinan berkurang, tingkat pendidikan meningkat, pemukiman tertata dengan baik dan fasilitas air bersih dan listrik tercukupi, serta luas kawasan mangrove meningkat.

(5) Perumusan tujuan

Dalam menentukan tujuan harus bersifat realistis sesuai dengan kemampuan sumberdaya yang ada dan kemampuan tenaga yang tersedia dan memungkinkan untuk dicapai tidak bersifat mengawang-awang.

Perumusan tujuan umum program ini adalah meningkatkan kemandirian masyarakat, khususnya petambak agar mampu menolong dirinya sendiri melalui peningkatan kapasitas dirinya (pengetahuan, sikap, keterampilan) dan peningkatan akses input dan pasar, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan pada masyarakat keseluruhan sekaligus juga terjaganya ekosistem hutan bakau di wilayah Muara Gembong. Adapun tujuan khususnya adalah:

- (1) Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat dalam teknis budidaya kepiting telur
- (2) Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat dalam aspek bisnis/manajerial usaha budidaya kepiting telur (perencanaan usaha, keuangan, pemasaran dll)
- (3) Meningkatkan pendapatan rumah tangga petambak
- (4) Meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petambak
- (5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat petambak secara keseluruhan
- (6) Teroganisimya para petambak dalam kelompok-kelompok petambak, yang tidak sekedar ada tetapi juga dinamis atau aktif beraktivitas untuk kepentingan anggota-anggotanya
- (7) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya ekosistem hutan bakau bagi kehidupan mereka
- (8) Meningkatkan jumlah tegakan pohon bakau di wilayah pesisir Muara Gembong

2. Input

Setelah tahapan perumusan tujuan aksi sosial ditetapkan, maka program aksi sosial sudah bisa dilaksanakan. Pada tahap awal pelaksanaan program aksi sosial, perlu mengidentifikasi input apa saja yang diperlukan, guna mendapatkan output yang diinginkan. Beberapa input yang perlu tersedia dalam program pengenalan budidaya kepiting telur antara lain sebagai berikut:

(1) Fasilitator

Fasilitator adalah orang-orang yang memiliki tugas untuk menggerakkan peserta pelatihan terlibat aktif dalam kegiatan aksi. Fasilitator berasal dari anggota tim penyelenggara, pendamping, maupun pelatih. Untuk pelatih diisyaratkan memiliki kompetensi yang tinggi dalam bidang teknis budidaya kepiting telur sekaligus teknis

belajar-mengajar. Selain pelatih dalam pelatihan, juga disediakan tenaga pendamping yang bertugas memberikan pendampingan bagi peserta program selama waktu tertentu sampai dianggap mereka sudah mandiri.

(2) **Dana**

Ketersediaan dana yang cukup akan banyak mempengaruhi keberhasilan program aksi sosial. Oleh karenanya, dalam perencanaan program perlu diperhitungkan pos-pos pengeluaran yang sesuai dengan dana yang tersedia. Sumber dana bisa diperoleh dari beberapa sumber, misalnya dari instansi pemerintah yang terkait ataupun lembaga donor lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

(3) **Alat dan bahan**

Peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan dalam program pengenalan budidaya kepiting telur, meliputi alat-bahan yang disediakan saat pelatihan maupun alat-bahan lain yang berbentuk bantuan bagi peserta program. Beberapa alat-bahan yang perlu disediakan antara lain: (a) alat bantu belajar mengajar di pelatihan; alat peraga, alat tulis, OHP dll, (b) benih kepiting, karamba, pakan, bibit pohon bakau dll.

(4) **Tambak**

Tambak sebagai tempat dimana keramba kepiting telur ditempatkan. Di tambak pula bibit pohon bakau ditanam, dengan tujuan konservasi sekaligus sebagai naungan dan menciptakan habitat kepiting.

(5) **Modul pelatihan**

Modul pelatihan disediakan untuk membantu peserta pelatihan memahami materi pelajaran lebih baik, dan membantu pelatih dapat mengajar secara sistematis.

(6) **Mitra kerja**

Peran mitra kerja dalam program ini sangatlah penting untuk pencapaian keberhasilan program itu sendiri. Beberapa pihak yang bisa menjadi mitra kerja ini bisa dari instansi pemerintah terkait, misalnya dari Perhutani, Dinas Peternakan-Kelautan dan Perikanan, maupun pemerintah desa, lembaga pemasar produk kepiting telur, pihak penyedia input usaha budidaya kepiting telur, lembaga keuangan/penyedia dana dll.

(7) **Data/informasi**

Berbagai macam jenis data atau informasi sangat diperlukan untuk mencapai *out put* yang diinginkan. Beberapa jenis data/informasi yang diperlukan misalnya: jumlah peserta program dan karakteristik sosial ekonominya, kondisi tambak dan kaulitas air, teknologi pertambakan yang selama ini ada, peluang pasar kepiting telur, jenis pohon bakau yang cocok di wilayah ini, teknik budidaya yang tepat sesuai dengan ekosistem setempat dan sebagainya.

3. Out put

Out put sebagai hasil yang diperoleh dari pengelolaan input-input di atas. Secara garis besar output terbagi atas jenis kegiatan/aktivitas yang dilakukan selama program ini dijalankan dan siapa saja yang menjadi sasaran program ini. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program pengenalan usaha budidaya kepiting telur adalah sebagai berikut:

- **Ceramah dan diskusi**

Kegiatan ceramah dan diskusi dilakukan dalam proses pelatihan maupun di luar pelatihan selama kegiatan aksi sosial ini berlangsung. Pada saat pelatihan metode ceramah dipilih untuk menyampaikan materi-materi yang sifatnya teknis yang selanjutnya dilakukan diskusi atau tanya jawab antara peserta pelatihan dengan fasilitator. Melalui adanya umpan balik ini fasilitator dapat mengetahui kedalaman pemahaman peserta atas materi yang disampaikan, sehingga pelatih bisa menjelaskan ulang bagian-bagian materi yang belum dipahami. Tujuan yang sama juga dilakukan pada saat pendampingan.

- **Praktek**

Materi pelatihan tidak hanya diterima melalui teori-teori saja, melainkan juga dengan langsung mempraktekkan teori-teori tersebut guna memperoleh pengalaman kerja. Dalam hal ini prinsip "*learning by doing*" diterapkan dalam program ini

- **Karya wisata**

Karya wisata dilakukan dengan melakukan kunjungan ke petambak di lokasi lain yang telah menerapkan usaha budidaya kepiting telur. Melalui kegiatan ini peserta pelatihan dapat memperoleh ilmu dari mereka yang telah berpengalaman sekaligus sebagai bentuk penguatan keyakinan akan keuntungan mengelola budidaya kepiting telur, karena mereka melihat sendiri keuntungan tersebut atau "*seeing is believing*"

- **Konsultasi**

Konsultasi bisa dilakukan oleh peserta program dengan fasilitator maupun tenaga pendamping yang ditempatkan di lokasi setempat. Melalui konsultasi masalah-masalah yang muncul terkait dengan usaha budidaya kepiting udang dapat bersama-sama dicarikan pemecahannya.

- **Kerjasama kelompok**

Kerjasama kelompok sangat ditekankan dalam program ini, karena dengan melalui kerjasama akan terjadi proses pembelajaran diantara anggota kelompok dengan cara saling bertukar pikiran dan pengalaman. Pada setiap kelompok beranggotakan antara 15 hingga 20 orang petambak.

- **Pertemuan kelompok**

Pertemuan kelompok secara rutin akan memberikan banyak manfaat bagi anggota kelompok. Selain sebagai sarana untuk berbagi masalah dan pengalaman sesama anggota, pertemuan kelompok dapat sebagai wahana bagi pihak luar kelompok ataupun fasilitator/pendamping untuk menyampaikan informasi yang terbaru secara efisien tidak perlu mendatangi anggota satu per satu.

- **Kerjasama dengan pihak terkait**

Kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan program ini sangat diperlukan untuk keberhasilan program itu sendiri. Beberapa pihak tersebut diantaranya:

- (1) **Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.**

Instansi ini merupakan wakil Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang berkepentingan terhadap pembangunan daerah yang di sektor peternakan, perikanan dan kelautan. Peran yang diharapkan dari instansi ini terkait dengan program aksi sosial ini adalah sebagai pihak yang memberikan legitimasi atau perijinan penyelenggaraan program dan memperlancar kegiatan secara keseluruhan. Program dari Departemen Kelautan dan Perikanan melalui Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, yaitu PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) bisa saja diintegrasikan dalam program pengenalan budidaya kepiting telur maupun pada saat pelaksanaan maupun nanti saat dalam pengembangannya.

- (2) **Pemerintahan Kecamatan**

Keterlibatan Pemerintahan Kecamatan Muara Gembong juga penting, karena program ini diselenggarakan di desa-desa di wilayah kecamatan tersebut. Diharapkan dengan adanya dukungan dari instansi ini program dapat berjalan dengan baik dan *legitimate*.

- (3) **Pemerintahan desa**

Pemerintahan desa merupakan lembaga birokrasi pemerintah yang terendah di level desa. Instansi ini memiliki kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan desa dan langsung berhubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi pemerintahan desa dibutuhkan dalam rangka pencapaian keberhasilan program.

(4) Tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memperoleh legitimasi dari masyarakat untuk memimpin komunitas. Umumnya pemimpin informal pada masyarakat pedesaan memiliki kekuatan pengaruh yang lebih tinggi dibandingkan pemimpin formal. Oleh karenanya, dukungan dari mereka akan mempengaruhi keberhasilan program ini.

(5) Lembaga keuangan

Lembaga keuangan sebagai lembaga yang dapat membantu petambak dalam menyediakan modal. Beberapa lembaga keuangan, seperti bank, BPR, BMT dan lembaga keuangan alternatif yang lain juga dapat dimanfaatkan oleh petambak. Beberapa bank saat ini memiliki skim kredit untuk usaha skala kecil maupun mikro dengan bunga yang cukup ringan bisa dimanfaatkan oleh petambak untuk membuka usaha baru maupun mengembangkannya.

(6) Agen Pemasaran

Agen pemasaran produk kepiting telur perlu juga dilibatkan dalam program ini, karena mereka sebagai agen yang memasarkan produk kepiting telur yang nantinya dihasilkan oleh peserta program. Kerjasama antara peserta program dengan agen pemasaran perlu dilakukan dengan asas saling menguntungkan atau resiprositas, dimana peserta program bisa memasarkan seluruh produknya dengan harga yang sesuai sedangkan agen pemasaran dapat memperoleh kontinuitas produk dan kualitas produk sesuai yang diinginkan pasar.

(7) Agen Penyedia input

Keberadaan agen penyedia input diperlukan untuk memenuhi kebutuhan input produksi usaha budidaya kepiting telur, diantaranya adalah penyedia bibit kepiting, bibit pohon bakau, bahan keramba dll.

• Interaksi berkala masyarakat dengan Perhutani

Mengingat bahwa latar belakang program ini adalah adanya konflik kepentingan penggunaan lahan tambak masyarakat dengan pihak Perhutani, maka sangat diperlukan adanya interaksi yang intens antara kedua belah pihak ini. Dengan interaksi maka akan menumbuhkan rasa saling percaya di antara keduanya, yang nantinya diharapkan mengurangi konflik yang terbuka maupun laten.

Bentuk output yang lain selain berupa jenis kegiatan seperti yang dijelaskan di atas, juga berupa siapa saja yang menjadi sasaran ataupun memperoleh manfaat dari program. Pada program pengenalan budidaya kepiting telur, sasarannya adalah:

(1) Petambak

Petambak adalah sasaran utama dari program ini, karena memang tujuan program ini adalah meningkatkan kesejahteraan petambak melalui usaha budidaya kepiting telur yang bersifat ramah lingkungan sekaligus mempertahankan bahkan meningkatkan ekosistem hutan bakau. Dalam program ini petambak dilibatkan dalam semua kegiatan, mulai perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi.

Di tingkat masyarakat petambak dibuat kelompok-kelompok binaan, yang tujuannya antara lain untuk meningkatkan efektifitas belajar di antara sesama anggota kelompok dan menggabungkan kekuatan anggota menjadi kekuatan yang lebih besar.

(2) Perhutani

Perhutani juga sangat berkepentingan dengan program ini, karena tujuan akhir dari program ini adalah terjaganya ekosistem hutan bakau yang juga menjadi mandat Perhutani. Diharapkan jika program ini berhasil, maka petambak tidak lagi mengusik hutan bakau yang dijaga Perhutani bahkan akan memperluas kawasan hutan bakau dari hasil kegiatan penanaman hutan bakau yang ditanam oleh masyarakat. Partisipasi yang diharapkan dari Perhutani dalam program ini adalah membantu dalam menginformasikan benih pohon bakau dan teknis budidaya penanaman

pohon bakau teknis. Di samping itu, program *sylovofisheries* dari Perhutani yang selama ini sudah berjalan bisa dijadikan rujukan ataupun informasi pada program ini.

4. Outcomes

Setelah tahap penyediaan input dan pencapaian output teralui, maka selanjutnya diharapkan akan diperoleh *outcomes* dari program pengenalan budidaya kepiting telur di Muara Gembong. *Outcomes* terbagi ke dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Dalam jangka pendek diharapkan program ini dapat meningkatkan pengetahuan peserta program tentang usaha budidaya kepiting telur, setelah itu memiliki sikap positif tentang usaha ini, dan akhirnya terampil dalam teknis budidayanya. Peningkatan ketiga ranah ini dapat terjadi melalui berbagai metode belajar mengajar, seperti ceramah, diskusi, karya wisata, mempraktekkan langsung materi yang telah diberikan dan sebagainya.

Pada tahapan berikutnya, diharapkan peserta program tidak hanya terampil dalam teknis budidaya kepiting telur, melainkan juga mampu mengelola usahanya secara komersial. Artinya bahwa mereka memiliki keterampilan manajemen yang baik dalam mengelola usahanya, sehingga memberikan keuntungan yang maksimal, misalnya mampu merencanakan atau membuat analisi usaha, mampu mengakses input, mampu mengakses pasar, dan mampu mengembangkan usahanya lebih maju. Dengan demikian pendapatan yang diperoleh akan jauh lebih tinggi dibandingkan usaha sebelumnya.

Mengingat bahwa pendapatan merupakan indikator utama dari kesejahteraan, maka jika pendapatan rumah tangga peserta program meningkat, maka kesejahteraannya juga akan meningkat. Semakin tinggi pendapatan suatu rumah tangga, maka semakin tinggi pula kemampuan rumah tangga tersebut dalam mengakses pendidikan, kesehatan, sandang, papan, pakaian dan lain-lainnya yang semuanya itu sebagai indikator kesejahteraan rumah tangga.

Berikutnya, jika keseluruhan rumah tangga sejahtera, maka akan berarti bahwa masyarakat secara keseluruhan juga akan sejahtera. Jika masyarakat Muara Gembong yang menjadi sejahtera dari usaha budidaya kepiting telur maupun usaha lain yang tumbuh sebagai efek terkait dengan usaha ini misalnya pengolahan kepiting telur, perdagangan kepiting telur, transportasi dll, maka peluang masyarakat untuk "mengganggu" hutan bakau menjadi berkurang bahkan hilang, sehingga akibat lanjutnya ekosistem hutan bakau di pesisir pantai Muara Gembong dapat terjaga dengan baik.

5. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rentang yang cukup panjang mulai sebelum pelaksanaan aksi sampai akhir pelaksanaan program. Banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan evaluasi ini, misalnya memberikan informasi tentang adanya unsur kesalahan sehingga segera bisa diperbaiki, menjaga agar kegiatan tetap pada koridor pencapaian tujuan, memberikan rasa kepuasan jika parameter yang ditetapkan terlampaui, menjadikan proses pembelajaran bagi peserta maupun penyelenggara, menjadi bahan masukan bagi penyelenggara untuk program yang lain, dan lain-lain.

Evaluasi sejak awal sudah dilakukan, bahkan sebelum program aksi dilaksanakan (tahap pengumpulan data sampai perumusan tujuan). Demikian pula pada setiap awal tahap kegiatan evaluasi (misalnya pada kegiatan pelatihan dan pendampingan) dilakukan. Pada saat berlangsung kegiatan program, baik untuk setiap tahap kegiatan maupun di tengah seluruh proses program keseluruhan evaluasi juga terus dilakukan dengan tujuan untuk segera melakukan perbaikan jika diindikasikan terjadi penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi akhir dilakukan pada setiap akhir sub kegiatan maupun akhir program keseluruhan. Hasil evaluasi akhir program dapat menunjukkan tingkat keberhasilan

program yang telah dilaksanakan. Beberapa indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan program pengenalan usaha budidaya kepiting telur adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat dalam usaha budidaya kepiting telur dalam hal teknis budidayanya.
- (2) Meningkatnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat dalam bisnis/manajerial usaha budidaya kepiting telur (perencanaan usaha, keuangan, pemasaran dll)
- (3) Meningkatnya pendapatan rumah tangga petambak
- (4) Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga petambak
- (5) Teroganisimya para petambak dalam kelompok-kelompok petambak, yang tidak sekedar ada tetapi juga dinamis atau aktif beraktivitas untuk kepentingan anggota-anggotanya
- (6) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya ekosistem hutan bakau bagi kehidupan mereka
- (7) Meningkatnya jumlah tegakan pohon bakau di wilayah pesisir Muara Gembong

Evaluasi dampak juga dilakukan, untuk mengetahui seberapa jauh dampak yang dirasakan oleh masyarakat maupun kondisi lingkungan setelah program berakhir. Diharapkan dampak yang positif yang muncul akibat dari program ini. Beberapa indikator dampak yang diinginkan adalah:

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat petambak secara keseluruhan
2. Meningkatnya luas kawasan hutan bakau di pesisir Muara Gembong
3. Berkurangnya kawasan yang mengalami abrasi laut
4. Membaiknya kondisi ekosistem perairan di sekitar pesisir Muara Gembong

KESIMPULAN DAN SARAN

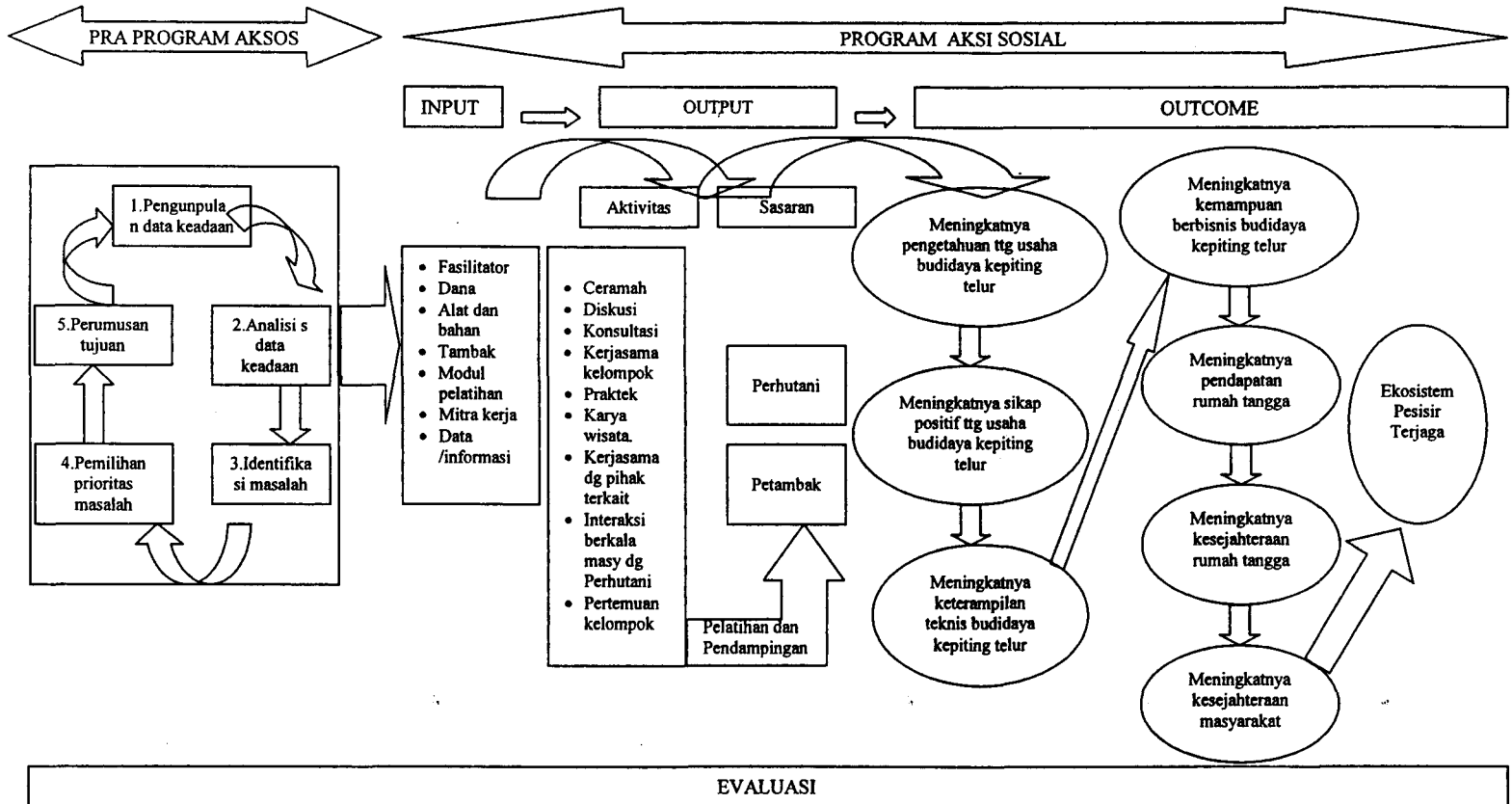
- (1) Berdasarkan elemen-elemen aksi sosial, maka gambaran dalam masyarakat di wilayah pesisir Muara Gembong, Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:
 - (a) Sebagai aktor yang terkait langsung dan utama dalam konflik pemanfaatan kawasan pesisir terutama pada hutan mangrove adalah masyarakat petambak dengan pihak Perhutani.
 - (b) Elemen kondisi situasional dan permasalahan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat hidup dari usaha tambak. Namun seiring dengan peningkatan jumlah penduduk lahan hutan bakau yang dilindungi diakuisisi untuk perluasan tambak. Di lain pihak keberadaan hutan bakau dipertahankan pemerintah melalui Perhutani sebagai upaya konservasi. Kedua kepentingan yang bertolak belakang ini telah menimbulkan konflik di antara keduanya.
 - (c) Tujuan masyarakat petambak adalah memperoleh penghidupan dari lahan pesisir dan hutan bakau, sebaliknya tujuan pemerintah mempertahankan hutan bakau dari pemanfaatan yang lain.
 - (d) Tata nilai dan norma yang mengatur masyarakat berifat legal formal maupun yang ditetapkan secara adat pada kegiatan pemanfaatan lahan pesisir maupun dalam pola hidup sehari-hari.
 - (e) Cara mencapai tujuan dari masyarakat petambak dalam memperoleh penghidupan adalah dengan membuka lahan hutan bakau sebagai lokasi tambak, tempat bermukim dan bahan bakar. Adapun cara yang diterapkan Perhutani dalam melindungi hutan bakau adalah dengan melakukan pengawasan, kerjasama dengan instansi lain serta peneakan sanksi bagi pelanggar aturan.

- (2) Model aksi sosial yang dapat diaplikasikan kepada masyarakat petambak di Muara Gembong adalah dengan menitikberatkan pada pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis pada masyarakat, dengan menganut prinsip utama pada partisipasi, pemberdayaan, kemandirian, dan keberlanjutan (*sustainability*). Alternatif program yang dipilih didasarkan pada pengakomodasian dua kepentingan yaitu meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik sekaligus mempertahankan kelestarian hutan bakau yang memiliki fungsi ekologis. Salah satunya adalah program budidaya kepiting telur yang memiliki prospek pasar yang baik dan dapat diterima masyarakat sekaligus tidak merusak lingkungan bahkan justru dapat memperluas tegakan pohon bakau. Tahapan aksi sosial diawali dengan pra pelaksanaan yang dilalui dengan cara pengumpulan data, analisis data, identifikasi masalah, pemilihan prioritas masalah, dan perumusan tujuan. Selanjutnya dalam pelaksanaannya dilakukan identifikasi terhadap segala input yang diperlukan untuk aksi sosial, merumuskan bentuk aktivitas yang akan dilakukan dan sasaran kegiatan (sebagai tahapan output). Setelah tahap penyediaan input dan pencapaian output terlalui, maka selanjutnya diharapkan akan diperoleh *outcomes* dari program pengenalan budidaya kepiting telur di Muara Gembong. *Outcomes* terbagi ke dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rentang yang cukup panjang mulai sebelum pelaksanaan aksi sampai akhir pelaksanaan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Powell, E.T. 2005. Logic Models to Enhance Program Performance. Nutrition, Food Safety and Health Conference March 31, 2005
- Suporahardjo. 2005. Manajemen Kolaborasi. Jakarta: Pustaka Latin
- Turner, Jonathan,H. 1978. The Structure of Sociological Theory. Revised Ed. Homewood Ill: The Dorsey Press.
- Wileden, Arthur. 1970. Community Development The Dynamic of Planned Change. New York: The Bedminster Press
- Yulianti, Eka. 2006. Tinjauan terhadap Konflik Pemanfaatan Lahan di Wilayah Pesisir (Studi Kasus Wilayah Pesisir Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. [Skripsi]. Bogor: Program Studi Manajemen Bisnis dan Ekonomi Perikanan-Kelautan FPIK IPB.
- Kerusakan Hutan Bakau tersedia di www.sgp-indonesia.org/sgp_news_view.php.newsid=5 diakses tanggal 20 Mei 2007
- Selamatkan hutan bakau kita tersedia di www.beritabumi.or.id/artikel3.php?idartikel=300 diakses tanggal 21 Mei 2007
- Luasan hutan bakau di Bekasi tersedia di www.kab-bekasi.go.id/content.php?news=215 diakses tanggal 22 Mei 2007





Gambar 1. Model Aksi Sosial Pengenalan Usaha Budidaya Kepiting Telur di Muara Gembong